

Jurnal Studi Ilmu Politik, di Publish oleh Program Studi Ilmu Politik
FISIP UIN Raden Fatah Palembang

Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik

Resty Nabilah¹, Izomiddin², Raegen Harahap³

^{1,2,3}Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email : restyasser@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of artists entering the world of politics or becoming a legislative candidate has been happening for a long time. Since the election during the New Order era, several artists have sat in Senayan representing the group's envoy faction, which consists of artists and religious figures. In this reform era, a number of celebrities have even become candidates for legislative members registered by political parties. Political parties nominate artists for reasons of urgent pragmatism. Artists have requirements to be quickly accepted by voters. Artists have social and financial capital so that winning works will be easier for artists to do than cadres who may need to work extra hard. So, artists were chosen because of their strategic position to collect votes for parties in the midst of tight competition in the 2019 election. In fact, candidates from among artists cannot always guarantee that they will be an effective means to boost vote acquisition. The popularity of artists is a major factor in political parties recruiting artists to become members of the legislature. This study shows that political parties do not carry out the functions of political parties properly. Artist popularity is a major factor in political parties recruiting artists to become members of the legislature. In this study, it can be seen that political parties do not carry out the functions of political parties properly. Therefore, researchers are interested in conducting research on this phenomenon.

Keywords: Political Party, Artist.

ABSTRAK

Fenomena artis terjun ke dunia politik atau menjadi caleg sudah lama terjadi. Sejak pemilu di zaman Orde Baru, beberapa artis pernah duduk di Senayan mewakili fraksi utusan golongan yang berisi seniman dan tokoh agama. Di zaman reformasi ini, sejumlah selebriti malah beramai-ramai menjadi calon anggota legislatif yang didaftarkan parpol. Parpol mencalonkan para artis karena alasan pragmatisme yang mendesak. Artis punya persyaratan untuk bisa diterima dengan cepat oleh pemilih. Artis punya modal sosial dan finansial sehingga kerja-kerja pemenangan akan lebih mudah dilakukan artis ketimbang kader-kader yang

mungkin perlu bekerja ekstra keras. Jadi, artis dipilih karena posisi strategis untuk jadi pengumpul suara bagi partai di tengah ketatnya kompetisi Pemilu 2019. Padahal, caleg dari kalangan artis tidak selamanya bisa menjamin menjadi sarana efektif untuk mendongkrak perolehan suara. Popularitas artis merupakan faktor utama partai politik merekrut artis menjadi anggota legislatif. Penelitian ini terlihat bahwa partai politik tidak menjalankan fungsi partai politik dengan baik. popularitas artis merupakan faktor utama partai politik merekrut artis menjadi anggota legislatif. Pada penelitian ini terlihat bahwa partai politik tidak menjalankan fungsi partai politik dengan baik. Oleh sebab itulah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang fenomena tersebut.

Kata Kunci : Partai Politik, Artis.

PENDAHULUAN

Fenomena artis terjun ke dunia politik atau menjadi caleg sudah lama terjadi. Sejak pemilu di zaman Orde Baru, beberapa artis pernah duduk di Senayan mewakili fraksi utusan golongan yang berisi seniman dan tokoh agama. Di era reformasi, semakin banyak artis yang terjun ke dunia politik. Terseretnya sejumlah politisi ke liang korupsi, membuat masyarakat tak lagi percaya dengan sepak terjang mereka.

Kehadiran artis menjadi alternatif bagi masyarakat. Meskipun, masih sekadar performatif alias mengandalkan penampilan. Sepertinya saat ini di politik, terjadi krisis kepercayaan dari politisi dan elit politik ketika lembaga-lembaga, individu-individu di mata masyarakat sudah hancur citranya. Mereka tengah kehabisan akal untuk mengembalikan citra itu. Akhirnya, salah satu upayanya ya menggandeng para artis itu. Secara substansial, belum ada dan bisa menemukan artis yang memiliki gagasan politik yang jelas yang menjadikan mereka bisa diandalkan. Akibatnya, tak ada lagi pemahaman yang memadai tentang politik yang kontemplatif dari para pelakunya.

Dalam konsep politik, partai politik memiliki fungsi untuk melakukan pendidikan politik, komunikasi politik, serta perekrutan politik. Fungsi-fungsi tersebut seakan-akan kurang maksimal. Masuknya artis juga memperlihatkan tiadanya proses perekrutan yang baik. Seandainya partai politik mampu

menjalankan fungsi perekrutan dengan baik, seharusnya mereka tak repot-repot menggotong para selebriti. (Astuti, Yuli F. 2013).

Partai politik membawa banyak keuntungan bagi pemerintah daerah. Jika mereka mau menanggapi kebutuhan untuk sepenuhnya mencerminkan komunitas lokal mereka dalam perekrutan dan proses seleksi dan mengubah persepsi peran anggota dewan lokal, mereka dapat memperoleh akses ke sumber bakat lokal yang jauh lebih besar dan menyediakan kepastian kepada pemerintah pusat dan mitra lokal dalam setiap tawaran untuk ditingkatkan kekuasaan dan pendanaan. (Foundation, Joseph R. 2006).

Di Pemilu 2019 tercatat ada 71 nama artis dari 10 partai politik yang mendaftar menjadi calon anggota DPR RI. Jumlah ini meningkat dibanding Pemilu 2014 yang mengajukan 60 artis dari 9 partai. Dari jumlah tersebut sebanyak 15 orang selebritis yang terpilih sebagai anggota DPR. Dari 71 artis tersebut, bukanlah semua artis papan atas. Beberapa di antaranya artis lama yang sudah tidak muncul lagi ke publik, ada pula artis pendatang baru. Ada bintang film, pemain sinetron, penyanyi, pemusik, pembawa acara, komedian, mantan atlet ternama, dan lain sebagainya.

Parpol mencalonkan para artis karena alasan pragmatisme yang mendesak. Artis punya persyaratan untuk bisa diterima dengan cepat oleh pemilih. Artis punya modal sosial dan finansial sehingga kerja-kerja pemenangan akan lebih mudah dilakukan artis ketimbang kader-kader yang mungkin perlu bekerja ekstra keras. Jadi, artis dipilih karena posisi strategis untuk jadi pengumpul suara bagi partai di tengah ketatnya kompetisi Pemilu 2019. Padahal, caleg dari kalangan artis tidak selamanya bisa menjamin menjadi sarana efektif untuk mendongkrak perolehan suara.

Faktor lain adalah masyarakat juga sudah sadar dan telah melek politik. Mereka lebih selektif dan menggunakan akal sehatnya dalam memilih wakil rakyat. Sehingga artis-artis yang terpilih kebanyakan selain mempunyai modal popularitas, juga punya modal sosial, finansial, dan juga intelektual. Artis-artis seperti ini biasanya akan terpilih kembali menjadi anggota dewan, bahkan tingkat elektabilitasnya mampu mengalahkan tokoh-tokoh politik yang berpengalaman.

Contohnya Rieke Diah Pitaloka, caleg artis dari PDIP dari Dapil Jabar VII, mampu meraup suara 255.044 suara, tertinggi di antara semua artis.

Faktor popularitas artis harus diikuti dengan kompetensi. Hal ini agar tidak dipermasalahkan oleh publik mengapa artis tersebut bisa masuk ke dunia politik. Apabila nanti mereka terpilih menjadi anggota parlemen, tapi tidak mengerti fungsi legislatif itu seperti apa. Tidak punya pemahaman dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran, hal ini tentu sangat menyedihkan.

Seharusnya ada aturan tertulis maupun kode etik yang mengatur agar mereka meninggalkan profesinya sebagai artis. Apalagi buat mereka yang baru terpilih, tidak punya background politik, banyak sekali yang harus dipelajari, sehingga kalau sambil mengerjakan profesi yang lain tidak fokus atau terbagi maka akan tertinggal pengetahuannya dengan orang-orang yang punya pengalaman politik yang lebih panjang.

Selama ini ada beberapa artis yang belum mau meninggalkan keartisannya. Mereka masih menerima job sebagai artis, bahkan secara rutin mengisi acara di televisi. Padahal caleg yang terpilih sudah diberi fasilitas dari negara berupa rumah, mobil, aneka tunjangan dan fasilitas serta gaji yang tidak sedikit. Karena itu, artis yang terpilih harus bisa fokus mengabdikan diri kepada negara.

Bagi partai politik, merekrut artis sebagai caleg menjadi salah satu cara untuk meningkatkan jumlah suara, karena artis / selebritis umumnya punya penggemar fanatik, yang selalu mendukung apa pun yang dilakukan idolanya. Bagi sang artis sendiri, kedudukan sebagai anggota legislatif akan menaikkan pamornya, selain sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tinggi, tetap terjaga.

Jadi ada dua keuntungan yang diperoleh, gengsi dan penghasilan. Walaupun gaji dan segala macam tunjangan sebagai anggota legislatif kadang tidak sebanding dibandingkan penghasilan sebagai artis, tetapi untuk karier yang sudah redup, akan jauh lebih baik. Mayoritas artis yang mendaftar sebagai caleg

bukanlah kader partai, atau bahkan sebelum ini mereka tak pernah berurusan dengan dunia politik.

Apa saja tugas sebagai anggota legislatif, jika kelak terpilih, banyak artis yang mengaku masih buta. Jika kelak terpilih, itu semata-mata karena popularitas mereka sebagai artis. Para pemilih di Indonesia memang baru sebatas tertarik dengan nama dan fisik tokoh yang dipilihnya. Misalnya karena ganteng, karena tutur katanya lembut, religius dan lain sebagainya yang tidak ada urusannya dengan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat atau pemimpin.

Fenomena meningkatnya calon selebritis di Indonesia ini menandai suatu perubahan strategi kandidasi di tubuh partai politik dan model pemenangan Pemilu. Pencalonan selebritis biasanya didasarkan oleh beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, selebritis tersebut memiliki hubungan kedaerahan dengan daerah pemilihan (Dapil) dimana mereka didaftarkan sebagai calon. Kedua, kandidasi selebritis di suatu dapil dimaksudkan untuk mempertahankan perolehan suara di suatu dapil agar tidak menurun.

Dari fenomena tersebut terlihat bahwa maraknya artis anggota legislatif dari periode ke periode yang di usung oleh beberapa partai politik. Dimana pada umumnya partai politik memiliki kader-kader yang berkualitas. Selebritis yang diusung jadi caleg itu pun tak tahu dengan kapasitas mereka. Mereka hanya mengandalkan masa pembekalan dari partai untuk mengisi wawasannya tentang politik dan tugasnya sebagai wakil rakyat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berupa studi pustaka. Metode pendekatan kualitatif bersifat explore atau mencari tau. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah: (1) Alamiah, (2) Data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) Analisis data dengan induktif, (4) Makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil akhir dari penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Untuk pengumpulan data yang konkrit ada beberapa teknik, yaitu: (1) Buku, (2) Jurnal (3) Artikel. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi pustaka berupa, mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, jurnal, artikel, internet, media online lainnya. Dalam penelitian ini peneliti mencari data dari berbagai literatur secara online lalu mendownload dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fenomena rekrutmen artis melihat dari perspektif teori partai politik.

Dalam penelitian analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Reduksi data yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari buku dan jurnal-jurnal. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, dan membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.

Kesimpulan dan Verifikasi, data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan

sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan bersifat sementara dan umum.

HASIL DAN DISKUSI

Mekanisme yang terjadi dalam hal ini adalah partai politik mencari dan mengajak orang yang dinilai berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Maka akan memperluas partisipasi politik. Partai politik menarik dari golongan selebritis dan golongan muda untuk dididik menjadi kader untuk masa yang akan datang serta menjaga eksistensi partai politik tertentu.

Salah satu instrument suatu Negara dikatakan sebagai Negara demokrasi adalah keberadaan partai politik dalam sistem politiknya, baik sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan prosedural demokrasi maupun untuk menuju substansial demokrasi. Partai politik menjadi jembatan aspirasi masyarakat untuk kemudian diartikulasi dan diagregasi dalam sistem politik Indonesia. Peranan partai politik sangatlah penting dalam sistem politik demokratis, partai politik menjadi penghubung dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan.

Penulis mendefinisikan selebriti dalam hal konsekuensinya untuk penonton dan individu selebriti , masing-masing, dan menyarankan bahwa nilai ekonomi selebriti berasal dari perhatian publik tinggi dan bunga yang dihasilkannya . Salah satu ciri khas selebriti adalah bahwa aktor sosial yang menarik perhatian publik. Semakin besar jumlah orang yang tahu dan memperhatikan aktor, semakin besar tingkat dan nilai selebriti yang aktor. Karakteristik kedua mendefinisikan selebriti adalah bahwa aktor diperoleh respon emosional yang positif dari masyarakat . Respon ini timbul karena aktor memiliki nilai positif (Trope & Liberman. 2000).

Dalam literature akademik keterlibatan artis dalam politik memakai istilah *Celebrity politics*. Ketenaran dan popularitas sangat mempengaruhi besar kecilnya suara yang akan diperoleh. Hal ini disebabkan oleh sistem pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia yang lebih mementingkan popularitas dibandingkan visi dan misi dari seorang calon kandidat. Diperparah lagi dengan minimnya peran serta masyarakat dan kurang pemahannya mereka tentang calon kandidat,

kemampuan dan pengalaman dibidang pembangunan masyarakat menjadi hal yang tidak penting bagi masyarakat umum.

Kecenderungan para selebritis terjun dalam panggung perpolitikan menimbulkan selentingan bahwa para selebritis hanya ikut-ikutan karena melihat teman sejawatnya yang terjun dalam panggung politik sukses dan menduduki jabatan terpenting (Fikri. 2012).

Seiring dengan perkembangan kampanye lewat media sosial partai politik cenderung mengemas strategi political branding di tingkat nasional dan langsung mengkampanyekan kepada pemilih melalui media sosial. Kecenderungan ini terindikasi dari bagaimana strategi partai secara umum diantaranya melalui **#2019GantiPresiden**, **#2019TetapJokowi**, mendukung atau mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi, hingga mencalonkan figur selebritis. Menguatnya model political branding yang mengarah pada pencitraan partai dan figur sekaligus semakin membuat partai politik juga mengusung kandidat selebritis sebagai alat untuk menarik perhatian pemilih saat kampanye.

Terdapat tiga pola rekrutmen politik di pilkada

- a. Arus bawah ke atas atau *bottom-up current*. Pola rekrutmen ini mengambil kandidat yang memiliki basis lokal. Kandidat yang dimaksud berdomisili di suatu daerah dan merupakan tokoh daerah, seperti aktivis, tokoh keagamaan, atau pengusaha lokal. Contoh: Joko Widodo, dia jadi wali kota Solo, lalu jadi gubernur DKI, lalu jadi presiden. Arus dari bawah ke atas terbukti bisa membawa tokoh lokal jadi tokoh nasional. Tentu sponsor dan dana besar yang membawanya dari Solo ke DKI.
- b. Arus atas ke bawah atau *top-down current*. Rekrutmen calon memanggil tokoh-tokoh nasional untuk mengisi posisi pimpinan eksekutif di daerah. Tokoh yang biasanya direkrut adalah politisi, aktivis nasional, dan pimpinan lembaga nasional. Contoh: Khofifah, yang merupakan tokoh nasional yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan menteri sosial. Emil Dardak merupakan politisi partai tingkat pusat. Syaifullah Yusuf merupakan Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor, dan Puti

Guntur merupakan anggota DPR RI. Arus yang membawa kedua paslon, nampak bahwa mereka semua adalah *top-down*. Meskipun Khofifah adalah orang Jawa Timur, tapi aktivitasnya selalu tingkat nasional. Pada arus ini, partai berperan sebagai penitip kepentingan nasional.

C. Arus kombinasi atau *combination current*. Pada arus ini, target seorang politisi adalah pemimpin eksekutif di tingkat lokal, namun ia mengawali langkahnya dengan terlebih dulu menjadi anggota DPR RI. Contoh: bupati Pamekasan. Dia jadi anggota DPR RI, lalu PAW (pejabat antar waktu), lalu nyalon jadi bupati. Yang biasanya melakukan ini adalah kader-kader partai politik.

Pada penelitian ini terdapat contoh kasus selebritis yang menjadi anggota legislatif yang merupakan suatu kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi partai dan perekrutan anggota legislatif.

“Kasus Mulan Jameela, Terpilihnya Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI menuai pro dan kontra. Pasalnya, Mulan Jameela mendapatkan posisi sebagai anggota DPR RI bukan karena terpilih langsung tapi merebut kursi Ervin Luthfi.

Tak sedikit pula yang meragukan kredibilitas Mulan Jameela menjadi anggota DPR karena latar belakangnya sebagai artis. Beberapa waktu lalu nama Mulan Jameela sempat ramai diperbincangkan setelah dirinya dilantik dan dianggap tak becus berkerja karena melihat tidak adanya riwayat pendidikan politik. Bahkan Mulan sendiri sempat diprotes oleh rekan sesama partainya sendiri di Gerindra. Setelah dilantik, Mulan juga sempat disinggung KPK atas dirinya yang masih menerima endorsement barang.

Masyarakat yang kontra terhadap terjunnya para artis ke dunia politik pasti akan berfikir seperti ini. “Apakah Artis yang selama menjalani karirnya hanya sibuk dengan dunia akting, pemotretan akan mengerti dengan aspirasi masyarakat?” “Akankah mereka punya kepekaan terhadap kondisi ekonomi, social, hukum dan sebagainya yang sering terjadi di masyarakat?”. Berbeda pula dengan masyarakat yang pro, yang akan berfikir siapa saja boleh

masuk kedalam dunia politik, karena setiap warga negara mempunyai hak kemerdekaan dalam berserikat dan berkumpul. Hal tersebut menjadi hak bagi setiap individu yang terjun langsung dalam ranah perpolitikan.

Dari uraian yang telah peneliti sampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa gagalnya rekrutmen artis dari partai politik. Popularitas artis merupakan faktor utama partai politik merekrut artis menjadi anggota legislatif. Seharusnya partai politik lebih mengutamakan mengusung kader dari partai itu sendiri bukan nya malah sembarangan mengusung artis yang tidak menjadi kader dan tidak mengikuti pendidikan politik terlebih dahulu. Pada penelitian ini terlihat bahwa partai politik tidak menjalankan fungsi partai politik dengan baik.

KESIMPULAN

Meningkatnya artis yang menjadi anggota legislatif dari tahun ke tahun merupakan salah satu kegagalan dalam perekrutan dari partai politik. Peneliti menganggap bahwa popularitas dan ekonomi menjadi salah satu faktor partai politik merekrut artis tersebut padahal belum ada skill, kemampuan, pemahaman dan pendidikan politik dari artis yang di usung oleh partai politik. Banyak kader-kader partai yang sudah mengikuti kaderisasi politik dan pendidikan politik sesuai dengan fungsi partai politik tetapi partai politik lebih mendahulukan mencalonkan artis sebagai anggota legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R, Deki. (2019). *Bukti Kegagalan Kaderisasi Partai Politik*. FISIP, Universitas Jambi.
- Abidin, Fadil (2018). *Fenomena Artis Menjadi Caleg*, diakses dari <https://analisadaily.com/berita/arsip/2018/8/13/601326/fenomena-artis-menjadi-caleg/> tanggal 7 September 2021.
- Altuglu, Murat. (2014). *Electoral Rules and Elite Recruitmen. A Comparative Analysis of the Bundestag And The U.S. House Of Representatives*. Florida International University.
- Areza, Muji, Sandi, Tri. (2020). *Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara. Medan.

- Resty Nabilah, Izomiddin, Raegen Harahap, Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik , *JSIPOL*, Vol.1 No 2, October 31, 2022
- Azni, Nur, Anindya, Besty. (2014). *Pola Rekrutmen Anggota Legislatif*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Erawati, Dedet. *Fenomena Pencalegan Di Kalangan Artis*. Universitas Padjadjaran, Jakarta Selatan.
- Foundation, Rowntree, Joseph. (2016). *Political Skills Forum. The Art Of Good Governance*.
- Harahap, Insan, (2016). *Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional*. Universitas Bakrie, Jakarta Selatan.
- [Http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politikdalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politikdalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis.html)
- <http://lipi.go.id/berita/single/CALEG-ARTIS-SO-WHAT/8635> diakses pada tanggal 24 September 2021
- <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/23/054500265/mulan-jameela-dan-13-artis-jadi-anggota-dpr-bagaimana-kinerja-artis-di?page=all> diakses pada tanggal 24 September 2021
- <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/23/092449065/infografik-daftar-14-artis-yang-jadi-anggota-dpr-2019-2024> tanggal 24 September 2021.
- Lobolo, Muhadam dan Ilham, Teguh. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Rajawali pers. Jakarta.
- Lubis, Qudsia, Madina. (2017). *Sejarah Demokrasi Di Indonesia*.
- Mufti, Muslim. (2013) *Teori-Teori Politik. Pustaka Setia*. Bandung.
- Mustika, Rieka dan Arifianto S. (2020). *Komodikasi "Popularitas Selebritis" Untuk Mendulang Suara Pemilu Legislatif 2019*. Studi Komunikasi dan Media.
- Pahlevi, Indra. (2015). *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*. Yogyakarta.
- Patawari. (2019). *Penataan Hukum Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Aspiratif*. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia Timur.
- Rafie, Taqiyyah, Barratut (2018). *Fenomena artis jadi caleg merebak lagi, ini kata pengamat*, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/fenomena-artis-jadi-caleg-merebak-lagi-ini-kata-pengamat> tanggal 7 September 2021.

Resty Nabilah, Izomiddin, Raegen Harahap, Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik , *JSIPOL*, Vol.1 No 2, October 31, 2022

- Roy C. Macridis. (1996). *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. (2009). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Schwartz, C David. (1969). *Toward a Theory of Political Recruitment*. University of Pennsylvania.
- Seligman, G Legter. (1961). *Political Recruitment And Party Structure: A Case Study*. University of Oregon.
- Seligman, G, Legter. (1958), "Perekrutan Dalam Politik".
- Sianturi, Agustiani, Kristiani. (2014). *Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik*. Kemenkumham. Sumatera Utara.
- Sigmun Neumann. (1998). *Kearah Studi Perbandingan Partai-partai Po/itik, Partisipasi dan Partai Politik*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Sitepu, Elisabeth. *Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat*. Medan.
- Sugiono. (2008). *Metodelogi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulaeman, Affan, (2015). *Demokrasi Partai Poltik Dan Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan dan Supriyanto, Didik. (2013). *Mendorong Demokrasi Internal Partai Politik*. PT. Kemitraan. Jakarta.
- Syukur. (2015). *Rekrutmen Politik Oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*. Universitas Islam Indonesia.
- Ware, Alan. (2000). *Political Parties and Party System*. New York: Oxford University Press.
- Wijaya, Herman, (2019). *Artis Jadi Anggota Legislatif, ApaUntungnya Bagi Rakyat?*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/mattbento/5b58b5805a676f5f1f4c1062/artis-jadi-anggota-legislatif-apa-untungnya?page=all> tanggal 7 September 2021.